

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Literatur

Dalam literature review ini penulis akan memperlihatkan hasil-hasil penelitian tersebut, setidaknya ada lima jurnal yang dapat digunakan sebagai rujukan diantaranya sebagai berikut:

Pertama, jurnal karya Kunthi Tridewiyanti yang berjudul “Kesetaraan dan Keadilan Gender di Bidang Politik “Pentingnya Partisipasi dan Keterwakilan Perempuan di Legislatif”. Dalam jurnal tersebut membahas mengenai partisipasi dan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif sangat penting karena perempuan di Parlemen memiliki peran strategis dalam proses pengambilan keputusan tentang undang-undang, anggaran, dan pengawasan. Sebagai warga negara, perempuan memiliki hak politik yang sama dengan laki-laki. Data menunjukkan bahwa perempuan sangat sedikit di bidang politik, terutama di Legislatif. Ini karena diskriminasi. Ketidaksetaraan gender dan ketidakadilan yang ditimbulkan oleh diskriminasi terhadap perempuan. Oleh karena itu, pentingnya mempertahankan keadilan dan kesetaraan gender di bidang politik melalui penerapan prinsip “tindakan khusus sementara”. Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, sinergitas, partisipasi penuh dalam proses pengambilan keputusan, dan keterwakilan yang lebih baik dalam posisi strategis kekuasaan adalah contoh tindakan khusus ini (Tridewiyanti, 2012).

Persamaan penelitian jurnal tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas seberapa penting partisipasi perempuan dalam politik dan apa saja yang menyebabkan perempuan terkecualikan dalam politik. Dalam jurnal tersebut membahas perempuan juga memiliki peran yang penting dalam politik karena perempuan memiliki peran dalam proses pengambilan keputusan tentang undang-undang, anggaran, dan pengawasan. Begitu juga dengan penelitian ini yang membahas bahwa peran perempuan juga sangat dibutuhkan dalam dunia politik, namun diskriminasi perempuan yang menyebabkan perempuan dikesampingkan dari dunia politik. Perbedaan dari penelitian jurnal tersebut dengan penelitian ini yaitu, jika jurnal tersebut tidak melibatkan organisasi internasional, penelitian ini melibatkan organisasi internasional seperti *UN Women* dan organisasi dari Swedia (SIDA). Dalam penelitian

ini membahas bagaimana upaya yang dilakukan oleh *UN Women* dan pemerintah Swedia dalam mendorong partisipasi politik perempuan di Turki.

Kedua, penelitian yang berjudul “*Women’s Political Participation In Turkey: Female Members of District Municipal Councils*”, di tulis oleh Zeynep Alemdar, Merve Akgül, Selin Köksal, dan Gökçe Uysal. Penelitian tersebut lebih berfokus pada bagaimana perempuan yang terlibat dalam politik lokal berkontribusi pada proses pembuatan kebijakan pemerintah daerah. Karena ketertarikan politisi perempuan pada pelayanan publik, apakah mereka lebih cenderung mendukung kebijakan yang memperhatikan gender? Oleh karena itu dalam penelitian ini para penulis menghitung ulang jumlah perempuan di dewan distrik lokal di seluruh Turki menggunakan data dari Dewan Pemilihan Umum Tertinggi. Laporan ini terutama berkonsentrasi pada kotamadya di distrik-distrik di mana perempuan memiliki kemungkinan yang lebih besar untuk memengaruhi pembuatan kebijakan karena posisi mereka yang lebih besar di dewan. Di enam provinsi—Istanbul, Bursa, Diyarbakır, İzmir, Ankara, dan Adana—para peneliti melakukan wawancara tatap muka, terstruktur, dan mendalam dengan 31 politisi perempuan dari lima partai yang berbeda. Pendapat mereka tentang politik, mencalonkan diri untuk jabatan, dan partai mereka merupakan pengingat betapa kayanya politik lokal dan nasional (Akgül et al., 2020).

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini sama-sama membahas mengenai partisipasi perempuan dalam politik di Turki. Namun, Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah jika penelitian tersebut objek penelitian tersebut lebih kepada seberapa banyak anggota perempuan di dewan distrik lokal Turki, penelitian ini berfokus pada bagaimana keterlibatan organisasi internasional seperti *UN Women* dan pemerintah Swedia untuk menciptakan lebih banyak lagi perempuan-perempuan yang berpartisipasi di bidang politik di negara Turki. *UN Women* berusaha untuk mengubah perspektif masyarakat Turki dan masyarakat di seluruh dunia tentang perempuan yang tidak dapat berpartisipasi dalam urusan politik. Karena Partisipasi perempuan dalam politik sangat penting untuk menjamin representasi politik yang adil dan proses pengambilan keputusan.

Ketiga, penelitian yang berjudul “*Turkey’s Gender Equality Performance from 2000 to 2019: A Rights-Based Analysis via UNDP Human Development and Gender Development Indices*” oleh Burça Kızılırmak, Emel Memiş, dan Gülay Toksöz membahas kinerja kesetaraan gender Turki dari tahun 2000 hingga 2019. Penelitian tersebut menganalisis kinerja Turki dengan menggunakan indeks pembangunan

tertentu, termasuk *Human Development Index (HDI)* dan *Gender Development Index (GDI)*, serta menyelidiki tren pembangunan gender dan ketidaksetaraan gender. Para penulis menggunakan pendekatan berbasis hak untuk menganalisis kinerja kesetaraan gender di Turki selama dua tahun terakhir yang mengalami kemajuan dan kemunduran. Penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan dan instrumen khusus diperlukan untuk memperbaiki ketidaksetaraan gender dan meningkatkan kesempatan kerja dan pendapatan perempuan. Studi ini ditugaskan oleh *United Nations Development Program (UNDP)* dan diteliti oleh *Association for Gender Equality Monitoring (CEİD)* (Kızılırmak et al., 2022).

Persamaan dari penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama menganalisis kinerja kesetaraan gender di Turki dan seberapa besar kesempatan kerja yang didapatkan oleh masyarakat perempuan di Turki untuk menciptakan pembangunan di negara tersebut. Perbedaan antara kedua penelitian ini adalah, penelitian tersebut tidak membahas bagaimana keterlibatan perempuan di dalam politik, hanya fokus kepada kinerja kesetaraan gender di Turki selama dua tahun terakhir yang mengalami kemajuan dan kemunduran. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa untuk memperbaiki ketidaksetaraan gender dan meningkatkan kesempatan kerja dan pendapatan perempuan, kebijakan dan instrumen khusus diperlukan. Sedangkan, pada penelitian ini penulis fokus kepada bagaimana partisipasi perempuan di dalam politik di Turki melalui upaya pemerintah Swedia melalui *UN Women* dalam mendorong hal keterlibatan perempuan dalam politik.

Keempat, Jurnal karya Putra, Ivan Yudha Firmansyah yang berjudul “Peran *Non-Governmental Organization* Dalam Meningkatkan Partisipasi perempuan di Turki”. Jurnal tersebut menjelaskan peran dan agenda LSM perempuan Turki dalam upaya meningkatkan partisipasi perempuan terhadap masyarakat, terutama dalam bidang ekonomi dan politik, dan juga bertujuan untuk meningkatkan kesetaraan gender. Meskipun Turki telah menandatangani dan meratifikasi sejumlah perjanjian internasional tentang hak-hak perempuan, akses politik dan sosial perempuan masih sangat terbatas. Fokus penelitian ini adalah fenomena *Non-Governmental Organization*, juga dikenal sebagai Organisasi Non-Pemerintah. Penelitian ini berfokus pada perkembangan politik perempuan dan asosiasi perempuan di Turki saat ini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan berbagai peran dan agenda yang diambil oleh organisasi non-pemerintah (NGO) yang terdiri dari sekelompok perempuan Turki. Fokus dari NGO ini adalah untuk meningkatkan partisipasi perempuan di ranah publik,

khususnya di bidang ekonomi dan politik, agar mereka dapat meningkatkan taraf hidup mereka dan mencapai kesetaraan gender (Putra & Ivan Yudha Firmansyah, 2018).

Persamaan jurnal tersebut dengan penelitian ini masih sama-sama membahas apa peran dan agenda organisasi yang bergerak di bidang kesetaraan gender untuk meningkatkan partisipasi perempuan Turki di bidang politik. Bagaimana organisasi seperti LSM dan *UN Women* dapat mendorong dan menciptakan negara Turki berperilaku adil antara perempuan dan laki-laki dalam mengembangkan pembangunan di negara Turki baik meningkatkan partisipasi perempuan terhadap masyarakat, terutama dalam bidang ekonomi dan politik, dan juga bertujuan untuk meningkatkan kesetaraan gender. Namun Perbedaan dalam penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu dalam penelitian ini mengangkat program yang di implementasikan oleh *UN Women* dan pemerintah Swedia, yaitu program yang dapat membuat partisipasi perempuan dalam politik di Turki semakin berkembang.

Kelima, penelitian yang berjudul “Peran *United Nations Women* Dalam Menanggulangi Diskriminasi Terhadap Perempuan di Afghanistan” yang di tulis oleh Fitrah Awaliyah Rumadaul. Penelitian ini membahas bagaimana peran *UN Women* dalam mengatasi diskriminasi terhadap perempuan di Afghanistan, serta ingin mengetahui apa saja kendala yang di hadapi oleh organisasi tersebut saat menanggulangi masalah diskriminasi yang dilakukan terhadap perempuan di Afghanistan. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa dalam menanggulangi masalah tersebut *UN Women* menghadapi berbagai kendala. Namun, semua upaya yang dilakukan oleh *UN Women* tetap memiliki dampak yang cukup besar terutama dalam meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya peran perempuan bagi suatu negara. Penelitian tersebut sama dengan penelitian ini karena sama-sama membahas diskriminasi perempuan pada suatu negara. Namun, yang membedakan adalah penelitian ini lebih fokus terhadap partisipasi perempuan dalam politik (Rumadaul, 2017).

Jika dilihat dari judulnya penelitian tersebut dengan penelitian ini memiliki persamaan yaitu sama-sama ada keterlibatan dari organisasi internasional yaitu *UN Women*, dan juga sama-sama membahas diskriminasi terhadap perempuan. Bagaimana perempuan masih di sepelekan dalam kehidupan bermasyarakat, dan masih tingginya angka ketidaksetaraan gender. Kesamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini juga sama-sama masih menyoroti apa saja kendala yang dialami oleh *UN Women* untuk mengggulangi masalah ketimpangan gender tersebut. Namun perbedaan antara

keduanya, yaitu jika dalam penelitian tersebut mengangkat negara Afghanistan, maka penelitian ini mengangkat negara Turki. Dalam penelitian tersebut juga tidak membahas bagaimana partisipasi perempuan dalam politik, sedangkan dalam penelitian ini mengangkat partisipasi perempuan dalam politik.

Berdasarkan penjelasan beberapa penelitian terdahulu diatas, penulis menggunakan penelitian tersebut sebagai acuan dan referensi untuk menyusun penelitian ini. Hal ini dikarenakan karena ada beberapa kemiripan dari beberapa penelitian terdahulu tersebut dengan penelitian ini. Kemiripan yang dimaksud yaitu bagaimana mengatasi ketimpangan gender dan mendorong partisipasi perempuan dalam politik dengan adanya bantuan dari organisasi-organisasi internasional.

2.2. Kerangka Teoritis

2.2.1. Tata Kelola Global

Tata Kelola Global (*Global Governance*) dimulai pada tahun 70-an dan semakin dikenal setelah Perang Dingin. Pada tahun 2005, dua orang sarjana hubungan internasional mengemukakan bahwa gagasan tentang tata kelola global telah mencapai status yang nyaris seperti selebriti. Konsep ini telah berkembang dari sesuatu yang baru menjadi salah satu topik penting dalam praktik dan studi hubungan internasional dalam waktu kurang dari sepuluh tahun. Terkadang, istilah tata kelola global digunakan hanya untuk menggambarkan organisasi internasional. Namun istilah tata kelola global ini lebih sering digunakan untuk menggambarkan "kapasitas kolektif yang digunakan untuk mengidentifikasi dan memecahkan masalah yang berskala global". Komisi Tata Kelola Global (*Commission on Global Governance*), yang terdiri dari para tokoh internasional terkemuka, menerbitkan sebuah laporan pada tahun 1995 tentang perubahan dalam kerja sama internasional yang dibutuhkan setelah Perang Dingin berakhir. Tata kelola adalah "jumlah dari berbagai cara yang dilakukan oleh individu dan institusi, baik pemerintah maupun swasta, untuk mengelola urusan bersama mereka", menurut definisi dari laporan ini, proses yang berkelanjutan di mana kepentingan yang saling bertentangan atau beragam dapat diakomodasi dan tindakan kolaboratif dapat diambil. Proses ini mencakup pengaturan formal maupun informal yang telah disepakati atau dianggap sebagai kepentingan mereka (Karns et al., 2015).

Tata kelola global sering dijadikan sebagai “pengaturan hubungan yang memiliki ketergantungan tanpa adanya otoritas politik secara keseluruhan, seperti dalam sistem internasional, dan tata kelola global berfokus pada sistem aturan di semua tingkat aktivitas manusia, untuk mengejar tujuan melalui penerapan kontrol yang memiliki dampak transnasional. Selama bertahun-tahun, literatur tentang tata kelola global mengutamakan negara dan organisasi internasional sebagai aktor utama, hal ini membatasi pengatur global swasta pada peran yang berbeda. Perusahaan multinasional, jaringan teroris, dan GSM adalah contoh pemerintah global swasta. Pemerintah global publik terdiri dari negara, organisasi internasional, dan jaringan antar pemerintah. Tata kelola global bukan hanya lembaga formal, organisasi seperti PBB dan IMF adalah hasil dari menerapkan teori ini ke dunia nyata. Tata kelola global mencakup berbagai organisasi, termasuk "suatu proses, dan bukan entitas yang mencakup semua pemangku kepentingan mana pun yang memiliki kepentingan dengan topik apa pun yang ada” (Rosenau & Czempiel, 1992).

Meskipun ide tentang tata kelola global memiliki sejarah yang panjang, versi modernnya adalah hasil dari perubahan yang terjadi sejak Perang Dingin berakhir. Tidak cukup hanya melihat organisasi internasional yang didirikan oleh negara untuk memahami upaya global untuk menyelesaikan "masalah tanpa paspor". Tata kelola global semakin bertumpu pada basis otoritas lain, meskipun negara-negara masih menggunakan kekuatan koersif dan mempertahankan kedaulatan mereka. Akibatnya, menurut Emmanuel Adler dan Steven Bernstein (2005: 302), "pemisahan antara kekuatan koersif dan kekuasaan yang sah merupakan ciri yang paling mencolok dalam tata kelola global kontemporer." Oleh karena itu, studi fenomena ini tidak hanya perlu mempelajari pola dan bentuk politik yang dapat diambil, proses, dan hubungan antara aktor dan peran mereka. Itu juga perlu mempelajari pola dan bentuk kekuasaan dan otoritas. Salah satu manfaat dari gagasan "tata kelola global" adalah bahwa itu memungkinkan kita melihat organisasi internasional (IO) sebagai proses jangka panjang yang mengorganisasikan upaya kolektif untuk memecahkan masalah yang berkaitan dengan semua orang, baik di masa lalu maupun di masa mendatang (Karns et al., 2015).

Penelitian ini sangat penting dalam konteks global karena seperti yang ditunjukkan oleh *World Economic Forum's Global Gender Gap Report* bahwa representasi dan partisipasi perempuan dalam politik di Turki masih sangat rendah. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki relevansi dengan perspektif tata kelola

global, dimana ditunjukkan dengan adanya keterlibatan *UN Women* dan pemerintah Swedia, khususnya melalui SIDA, dalam menjalankan program *Gender Equality in Political Leadership and Political Participation in Turkey*. Penelitian ini mengungkap tantangan dan cara-cara yang dihadapi perempuan ketika mereka berusaha mengambil peran kepemimpinan dan berpartisipasi dalam politik di berbagai tingkatan. Untuk mengatasi tantangan struktural, institusional, dan kultural ini, diperlukan kerja sama yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah dan organisasi internasional. Tujuan dari program yang dijalankan oleh *UN Women* dan yang didanai oleh SIDA ini adalah untuk mendorong perempuan untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan kepemimpinan politik di Turki. *UN Women* Turki telah berupaya mendorong masyarakat perempuan di Turki untuk menjadi pemimpin dan memungkinkan keterwakilan perempuan yang adil dalam politik dan pemerintahan yang menjadi langkah penting untuk mencapai perubahan yang sebenarnya. Hal ini mencerminkan komitmen global untuk memajukan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.

2.2.2. Feminisme Liberal

Sampai saat ini, ada beberapa masalah sosial yang menarik untuk dibahas. Salah satunya adalah perjuangan untuk mencapai keadilan dan kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan. Dikatakan menarik karena pola hubungan yang "menindas" perempuan tetap ada hampir dalam setiap interaksi sosial yang terbangun di kalangan masyarakat. Berbagai gerakan sosial muncul sebagai akibat dari gambaran penindasan yang dialami kaum perempuan. Gerakan-gerakan ini bertujuan untuk memperjuangkan keadilan dan membebaskan kaum perempuan dari penindasan. Gerakan tersebut disebut sebagai feminisme. Sebenarnya, kaum perempuan telah melakukan gerakan ini sejak abad ke-18, terutama di Eropa, tetapi baru pada tahun 60-an gerakan feminisme mencapai puncaknya. Paradigma yang awalnya hanya memperjuangkan hak-hak perempuan sekarang berkembang menjadi perjuangan untuk keadilan universal untuk semua orang. Untuk membalikkan tatanan sosial yang didominasi oleh laki-laki, teori feminisme bergantung pada pemahaman tentang alasan mengapa perempuan tertindas. Gerakan ini mengalami pertumbuhan

yang luar biasa di akhir tahun 60-an dan awal tahun 1970-an, dan disebut sebagai periode kebangkitan feminisme gelombang kedua (Bendar, 2019).

Gerakan feminisme muncul di beberapa negara sebagai tanggapan terhadap berbagai masalah, seperti penindasan dan ketidakadilan terhadap perempuan. Wanita berjuang untuk mendapatkan hak dan kesempatan yang sama. Mereka juga berjuang untuk kebebasan mereka untuk mengambil alih dan menentukan jalan hidup mereka sendiri. Kaum perempuan menunjukkan reaksi ini melalui aksi dan tulisan. Perjuangan perempuan untuk mendapatkan hak yang sama telah membawa hasil. Dalam beberapa aspek kehidupan sosial, seperti pendidikan, pekerjaan, politik, dan sebagainya, perempuan dan pria memiliki akses yang sama. Tetapi tidak serta merta kaum pria dan perempuan sudah setara. Di beberapa negara, tubuh perempuan masih dianggap sebagai objek. Ini terlihat dalam iklan yang menampilkan bagian tubuh perempuan yang dianggap seksual. Selain itu, isu pemerkosaan, kekerasan seksual, dan kekerasan dalam rumah tangga terus muncul (Bendar, 2019).

Feminisme adalah ide perubahan sosial dan perlawanan sosial. Dengan kata lain, feminisme adalah gerakan yang berusaha mendapatkan kesetaraan dan hak yang sama dengan laki-laki. Bukan hanya melawan laki-laki, gerakan feminisme adalah perlawanan terhadap struktur sosial yang menganggap bahwa laki-laki memiliki status yang lebih tinggi. Fokus gerakan feminisme adalah memecahkan struktur sosial di mana laki-laki berkuasa atau mendominasi perempuan. Budaya patriarki adalah sistem di mana laki-laki mendominasi perempuan. Menurut Fakih, feminisme liberal adalah salah satu dari empat aliran feminisme yang diklasifikasikan oleh para ahli (Bendar, 2019).

Feminisme liberal adalah salah satu dari banyak aliran feminisme yang muncul selama perkembangan feminisme. Aliran ini muncul sebagai kritik terhadap teori politik liberal yang biasanya mendukung kebebasan, persamaan, dan otonomi. Mary Wollstonecraft, John Stuart Mill, dan Helen Taylor adalah pelopor pertama feminisme liberal. Aliran ini mengacu pada argumen filsafat liberalisme dan berusaha menjelaskan hak dan kebebasan perempuan. Gerakan feminis liberal dimulai oleh Mary Wollstonecraft (1759 - 1799). Ia menulis *A Vindication of the Rights of Woman*, yang menyatakan bahwa perempuan harus mendapatkan pendidikan seperti halnya laki-laki agar mereka dapat berkembang menjadi individu yang moral dan mandiri. Fokus utama feminisme liberal adalah reformasi politik dan hukum yang bertujuan untuk memberikan hak dan kesempatan yang sama kepada

wanita dalam hal pendidikan, suara politik, dan gaji. Menurut feminisme liberal, masyarakat memegang kepercayaan yang salah bahwa perempuan pada dasarnya kurang mampu secara mental dan fisik dibandingkan laki-laki, yang menyebabkan diskriminasi terhadap perempuan di bidang pendidikan dan karir. Feminis liberal percaya bahwa perempuan disubordinasikan karena adat dan hukum yang menghalangi mereka untuk sukses di dunia publik. Namun, perempuan hanya perlu dididik dan diberi hak yang sesuai dengan sifatnya dan setara dengan laki-laki (Maulid, 2022).

Pada dasarnya, feminisme liberal adalah ideologi yang mendukung kemajuan kebebasan, terutama dalam hal ekonomi dan politik. Feminisme liberal berusaha menerapkan filosofi liberalisme pada kesetaraan gender. Para feminis juga percaya bahwa wanita ditindas karena tidak memiliki hak politik dan sipil, yang terlihat dari kurangnya partisipasi perempuan dalam perjuangan sipil politik. Pemberdayaan perempuan untuk berpartisipasi aktif dalam politik adalah pilar utama feminisme liberal. Ini termasuk mendukung perempuan untuk mengatasi tantangan politik dan struktural yang mereka hadapi. Menurut feminisme liberal, keterwakilan perempuan dalam politik sangat penting untuk mencapai kesetaraan gender. Dianggap sebagai cara untuk meningkatkan peran laki-laki sebagai pendukung kesetaraan gender dan meningkatkan kesadaran dan solidaritas antara perempuan melalui partisipasi perempuan dalam politik. Selain itu, feminisme liberal menekankan betapa pentingnya pengarusutamaan gender dalam politik. Dianggap sebagai cara untuk meningkatkan kesetaraan gender dan partisipasi perempuan dalam politik adalah pengarusutamaan gender (Anita Dhewy, 2022).

Feminisme liberal mendukung reformasi hukum untuk menghapus tantangan diskriminatif yang mencegah perempuan berpartisipasi dalam politik. Ini mencakup penghapusan undang-undang yang bias terhadap gender dan penerapan kebijakan yang mendukung gender, seperti kuota gender. Selain itu, dianggap penting bagi perempuan untuk berpartisipasi lebih penuh dalam politik melalui kebijakan yang mendukung keseimbangan antara kehidupan kerja dan keluarga, seperti cuti melahirkan dan layanan pengasuhan anak yang terjangkau. Feminisme liberal menekankan bahwa perempuan harus menerima perwakilan politik yang sama. Representasi ini penting dari sudut pandang keadilan dan karena perempuan mewakili perspektif yang berbeda dan signifikan dalam proses pengambilan keputusan politik (Anita Dhewy, 2022).

Berkembang dari teori pluralisme negara, para feminis liberal menganggap negara sebagai penguasa yang tidak memihak antara kepentingan kelompok yang berbeda. Mereka menyadari bahwa kaum pria menguasai negara, yang ditunjukkan oleh kepentingan "maskulin", tetapi mereka juga menganggap bahwa kepentingan dan kekuatan kaum pria ini dapat mendominasi negara. Dapat dikatakan bahwa, negara adalah representasi dari kelompok kepentingan yang mengontrolnya. Mereka yang berpartisipasi dalam gerakan feminis liberal percaya pada prinsip-prinsip dan tanggung jawab negara, dan mereka memperjuangkan kebebasan perempuan. Salah satu tujuan feminisme liberal adalah untuk meningkatkan kesadaran bahwa wanita adalah kelompok yang tertindas. Wanita yang bekerja di sektor domestik dianggap tidak produktif dan dianggap subordinat. Keberhasilan feminisme sangat didukung oleh budaya individualis dan materialistis masyarakat Amerika. Wanita tergiring keluar dari rumah, berkarier secara mandiri, dan meninggalkan ketergantungan mereka pada pria (Retnani, 2017).

Teori feminisme liberal memiliki keterkaitan dengan penelitian ini karena para feminis liberal juga memperjuangkan kebebasan hak perempuan dalam bidang apapun. Sebagian besar kaum liberal feminis percaya bahwa perempuan dalam "negara" hanyalah warga negara dan bukan pembuat kebijakan. Jadi, dalam kasus ini, perempuan tidak setara dalam politik atau bernegara. Selain itu, pandangan kaum feminist liberal tentang "kesetaraan" setidaknya memengaruhi perkembangan "pengaruh dan kesetaraan perempuan untuk melakukan kegiatan politik seperti membuat kebijakan negara". Salah satu tujuan feminisme liberal adalah untuk meningkatkan kesadaran bahwa wanita adalah kelompok yang tertindas. Dianggap tidak produktif, pekerjaan wanita di sektor domestik digambarkan sebagai subordinat. Kebebasan dan kesetaraan rasionalitas adalah inti dari teori ini. Karena perempuan adalah makhluk rasional dengan kemampuan yang sama dengan laki-laki, mereka harus diberikan hak yang sama. Oleh karena itu penelitian ini sangat relevan dengan teori ini karena dalam penelitian ini juga membahas tentang bagaimana peran *UN Women* dan pemerintah Swedia (SIDA) memperjuangkan hak-hak perempuan untuk ikut berpartisipasi dalam politik terutama di negara Turki.

2.3. Asumsi Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas asumsi dasar yang akan dikemukakan dalam penelitian ini adalah: *UN Women* dan pemerintah Swedia berupaya untuk meningkatkan partisipasi politik perempuan di Turki melalui program *Gender Equality in Political Leadership and Political Participation in Turkey*. Hal tersebut memiliki relevansi dengan prespektif tata kelola global, dimana ditunjukkan dengan adanya keterlibatan *UN Women* dan pemerintah Swedia. Khususnya, melalui SIDA yang ditujunkkan dengan adanya pendanaan yang diberikan oleh SIDA sebesar 20 juta SEK (*Swedish Krona*), yang setara dengan sekitar 2 juta USD. Bantuan pendanaan ini memainkan peran penting dalam mendukung program *Gender Equality in Political Leadership and Political Participation in Turkey*. Di Turki, dana ini telah digunakan untuk berbagai upaya untuk meningkatkan kesetaraan gender dalam politik, termasuk pelatihan kepemimpinan dan kampanye yang mendukung dan advokasi calon perempuan. Finansial ini sangat penting untuk mendorong perubahan kebijakan dan sosial yang diperlukan untuk memungkinkan perempuan Turki berpartisipasi politik yang lebih setara.

2.4. Kerangka Analisis

Kerangka analisis adalah penjelasan ilmiah tentang preposisi antarkonsep dan konstruk, atau hubungan dan korelasi antarkonsep penelitian. Untuk merumuskan hipotesis, pertautan atau hubungan antarkonsep ini sangat penting. Dengan kata lain, hipotesis hanya dapat dibuat setelah memberikan penjelasan ilmiah tentang pertautan atau hubungan antarkonsep yang diteliti (Juliandi & Manurung, 2014).

Sebuah kerangka analisis bukanlah sekumpulan informasi yang dikumpulkan dari berbagai sumber; namun, kerangka analisis membutuhkan lebih dari sekedar data atau informasi yang relevan dengan penelitian. Kerangka analisis membutuhkan pemahaman peneliti tentang hasil pencarian dari berbagai sumber sebelum digunakan. Pemahaman yang dibangun dalam kerangka analisis berfungsi sebagai dasar bagi pemahaman sebelumnya. Pada akhirnya, dasar analisis ini akan menghasilkan pemahaman yang mendasar, yang akan berfungsi sebagai dasar bagi setiap pemikiran lainnya (AD Yuniyanto, 2018).

Metode analisis penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dimana kerangka analisis kualitatif lebih menganalisis secara mendalam atau meneladani apa yang akan

diteliti. Kerangka analisis kualitatif menggunakan rumus yang berkaitan dengan beberapa pendekatan. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus dan studi literatur maka, rumus yang akan di gunakan yaitu input, proses, dan output. Kerangka analisis di atas akan diterapkan dalam kerangka konseptual sesuai dengan penelitian yang akan diteliti yaitu “Mendorong Partisipasi Politik Perempuan di Turki”.

Dalam penelitian ini untuk mendorong partisipasi politik di Turki dibutuhkan bantuan dari *UN Women* dan pemerintah Swedia melalui program *Gender Equality in Political Leadership and Political Participation in Turkey* dengan kendala-kendala yang yang dihadapi yaitu masih banyak diskriminasi terhadap gender khususnya perempuan di Turki.

Bagan 1.1. Kerangka Alur Pikir

